



BPK Diminta Audit Ganti Rugi JK I

PT. Anis Harus Buka Dana
yang Diterima

Borneo Tribune, Pontianak

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar diminta untuk melakukan audit investigasi ganti rugi atas penabrakan Jembatan Kapuas I, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Anis maupun Pemerintah atas ganti rugi tersebut.

"Jangan sampai ada fitnah dan masyarakat mereka - reka atas ganti rugi itu, lebih baik diaudit saja, biar semua terbuka, jadi jika terjadi penyimpangan langsung ketahuan," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, H. M. Fauzi, Sabtu (9/8) kemarin.

Menurut H.M.Fauzi, seha-

rusnya setiap ganti rugi diumumkan kepada masyarakat, melalui media cetak dan elektronik, tetapi sampai saat ini, tidak diketahui sama sekali ganti rugi yang sudah diterima oleh pihak ketiga (PT. Anis-red).

"Perlunya diketahui masyarakat, karena yang dirugikan adalah masyarakat, jadi wajib masyarakat mengetahui berapa ganti rugi, dan sudah sampai tahap mana pengerajananya," jelasnya.

"Pasti masyarakat bertanya-tanya, kenapa perbaikannya baru sekarang dilakukan oleh PT.ANIS, apa baru diganti sekarang atau bagaimana," sambungnya.

....Ke Halaman -11

Tiga anggota Tim dari Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengukuran perhitungan statis saat uji beban Jembatan Kapuas I, di Pontianak, Kalbar beberapa waktu lalu. Foto : ist.



BPK Diminta Audit Ganti Rugi JKI

Lanjut Fauzi, maka dari itu perlunya wujud transparansi atas ganti rugi Jembatan Kapuas I, perlunya dilakukan audit BPK RI Kalbar.

"Karena perlu diketahui, dari mana uang perbaikan Jembatan Kapuas I, apakah dari APBN atau APBD atau uang dari ganti rugi itu sendiri, karena terkesan lamban perbaikannya," jelasnya lagi.

"Yang jelas jika berdasarkan hasil audit nantinya ada temuan penyimpangan dari hasil audit BPK, tentunya kita memintai Polda dan Kejati Kalbar segera menindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan. Lantaran saat ini Masyarakat menganggap perintah tidak serius dalam melakukan perbaikan Jembatan, bahkan hingga Hari Raya Idul Fitri kemarin pun belum bisa difungsikan Jembatan Kapuas I," tegas Fauzi.

Selain itu pula Fauzi meng-

takan, berdasarkan keterlambatan perbaikan jembatan dan tidak transparansinya atas ganti rugi Jembatan Kapuas I, mulai dari Bulan Agustus 2013 dan Maret 2014, bisa saja Polda dan Kejati saat ini melakukan penyelidikan.

"Masalahnya saat ini Polda maupun Kejati ada keinginan atau tidak, karena hal tersebut sudah menyebabkan kerohanian bagi pengguna jalan maupun masyarakat Kota Pontianak," ujarnya.

Ditambahhnya, jika suatu saat nanti, masalah tajap perbaikan dan uang ganti rugi, yang didiamkan atau dipendam oleh para sejumlah oknum terkait ganti rugi ini, tentunya wajib dipertanyakan.

"Ini sangat wajib

diperintahkan, jika memang

tidak ada kejelasan atas

tahapan perbaikan maupun

ganti ruginya, karena infor-

masi publik dan keterbukaan

publik hak dari masyarakat," cecarnya.

Salah seorang warga Tangungraya, Yanto menuangkan perbaikan jembatan Kapuas I masih cepat diselesaikan. Pasalnya, masyarakat pengguna jalan dan pengguna jalan dan menengah sudah menderita kerugian yang tidak sedikit. "Dengan tidak berfungisinya jembatan Kapuas I untuk kendaraan roda empat keatas, kami sebagai pengguna jalan dan pengusaha kecil dan menengah sangat dirugikan. Tiap hari kalau mau antar jualan ke pasar Flamboyan selalu harus ke kabupaten Kubu Raya, selain bahan bakar minyak yang jadi beban, juga waktu dan tenaga," kesal Yanto.

Kata Yanto, beberapa waktu lalu Walikota Pontianak, H Sutarmidji mengatakan perbaikan jembatan Kapuas I pada masa Idulfitri akan klar. "Tapi

nyatanya sampai sekarang juga belum klar. Lagipula, saat ini pelaku pengrusakan jembatan Kapuas I juga tak pernah diketahui masyarakat lagi, apakah ditahan, atau tetap dihukum atau dibebaskan, juga kita tidak tahu. Mestinya, transparanlah kepada masyarakat," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh orangtua murid yang anaknya bersekolah di wilayah Pontianak Selatan, Frederik mengatakan hingga saat ini ketika mengantar dan menjemput anak mestinya membutuhkan waktu yang ekstra. "Kalau berangkat dan jemput lebih awal dari biasanya, bahkan yang jadi masalah antrean di simpang empat di kawasan jembatan Kapuas II, kalau pulang harus antrean hampir 30 menit hingga satu jam. Nah ini, masalah yang paling berat yang segera dituntaskan," pinta Frederik. (zrn/haes)